

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dukungan politik menjadi salah satu faktor penting atas keberhasilan suatu bisnis, para pelaku bisnis sangat sadar bahwasannya elite politik memiliki kekuasaan atas penyusunan kebijakan yang nantinya dapat mempengaruhi iklim perekonomian yang berimbas pada keberhasilan bisnis perusahaan. Politik dan bisnis, keduanya mempunyai pola hubungan yang saling terkait. Layaknya hubungan timbal balik antar individu dimana aktifitas politik seharusnya dapat menunjang kegiatan bisnis dalam sebuah lingkup negara. Hal yang sama terjadi dengan bisnis yang dapat mendukung kegiatan politik untuk mempertahankan kedaulatan Negara (Suwito, 2014). Hubungan timbal balik antara bisnis dan politik yaitu pelaku bisnis akan mendapatkan kemudahan kebijakan-kebijakan untuk mendukung keberhasilan suatu bisnis dengan adanya bantuan dari politik, sebaliknya politik akan mendapatkan pendanaan dari pelaku bisnis yang mampu mendukung kegiatan partai politik tersebut.

Berkaitan dengan pendanaan partai politik sendiri telah diatur ke dalam UU No.2 tahun 2011 dimana sumber pendanaan partai politik berasal dari iuran anggota dan sumbangan sah yang kemudian dijelaskan pada pasal 35 UU No. 2 tahun 2011 bahwa sumbangan yang sah yang berasal dari perorangan maksimal adalah sebesar 1M dalam kurun waktu 1 tahun, Untuk badan usaha sumbangan maksimal sebesar 7,5 Milliyar dan sumbangan sah lain yang berasal dari APBN. Namun pada praktiknya dalam hal pendanaan Partai Politik di Indonesia lebih banyak bergantung pada bantuan pemerintah dan bantuan korporasi, jika dibandingkan pada iuran anggotanya sendiri (Vermonte, 2012). Partai politik yang bergantung pada bantuan pemerintah atau lebih banyaknya kepada korporasi bisa mendapatkan pendanaan yang lebih banyak, dikarenakan tidak adanya batasan dalam menerima pendanaan dari pelaku bisnis.

Seperti yang sudah kita pahami, hubungan antara politik dan bisnis ini kemudian memunculkan istilah perusahaan terkoneksi politik, Faccio (2006), suatu perusahaan yang terhubung secara politik apabila setidaknya salah satu pemegang saham terbesar

perusahaan (secara langsung atau tidak langsung mengendalikan perusahaan setidaknya memiliki persentase kepemilikan 10% saham), atau salah satu dari pejabat puncak (CEO, Ketua Dewan, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, kepala negara, atau memiliki hubungan emosional dengan politisi atau partai.

Di Indonesia sebuah perusahaan yang terkoneksi politik akan mendapat beberapa kemudahan antara lain kemudahan dalam hal pendanaan kegiatan perusahaan, beberapa perusahaan yang memiliki koneksi politik bahkan dapat dengan mudah mendapatkan hutang untuk pembiayaan modal hanya dengan mendapatkan memo pinjaman dari politisi (Husnan, 2001). Selain itu kemudahan lain yang dapat diperoleh sebuah perusahaan yang terkoneksi politik adalah kemungkinan dapat menikmati pajak yang rendah dan juga kekuatan pasar yang lebih unggul Faccio (2006), sedangkan menurut Wulandari (2012) kemudahan lain yang diterima perusahaan apabila memiliki koneksi politik adalah kemudahan untuk mendapatkan kontrak atau memenangkan tender proyek dari pemerintah .

Disisi lain adanya koneksi politik juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi suatu perusahaan, secara teoritis koneksi politik menekan pertumbuhan sebuah perusahaan, dari hal tersebut maka koneksi politik dapat menyebabkan kinerja perusahaan yang tidak efisien (Shleifer & Vishny, 1994)

Sebagai contoh di Indonesia, salah satu perusahaan property terbesar di Jakarta yaitu Lippo Group yang menjalin hubungan baik dengan presiden sekarang ini Joko Widodo, dimana perusahaan keluarga konglomerat Riady ini merupakan salah satu perusahaan besar yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi-JK pada Pilpres tahun 2014 lalu (detik.com, 2016). Setelah kemenangan Jokowi-JK, saham milik Lippo Group di pasar modal meningkat tajam. Sebagian perusahaan Lippo Group, mencatat keuntungan yang berlipat ganda pada tahun 2014. Harga saham Multipolar (MLPL) melonjak 105,56% ke Rp 740 per saham. Kemudian harga saham Lippo Cikarang (LPCK) tumbuh 76,41% menjadi 8.600 rupiah per lembar saham.

Disisi lain, hasil yang berbanding terbalik didapatkan oleh, Grup MNC dan Grup Bakrie. Ini disinyalir disebabkan karena pengendali Grup Bakrie Aburizal Bakrie dan pemilik Grup MNC Hary Tanoesoedibjo adalah pendukung pasangan Prabowo Subianto-

Hatta Rajasa. Beberapa saham Grup Bakrie babak belur. Harga saham Bumi Resources (BUMI) anjlok 48% (ytd). Bahkan harga saham Bakrieland Development (ELTY), Bakrie Telecom (BTEL) dan Bakrie Sumatra Plantations (UNSP) berada di harga Rp 50 per saham. Harga emiten Grup MNC juga merosot sejak awal bulan ini (Juli 2016). Contohnya harga saham Media Nusantara Citra (MNCN) turun 6% menjadi Rp 2.605 per saham.

Hubungan antara pengusaha dengan partai politik sebenarnya bukan hal yang baru dan bahkan sudah ada UU yang mengatur kebijakan antara hubungan partai politik dengan badan swasta di Indonesia. Dana yang dimiliki partai politik tidak cukup hanya dari iuran anggota partainya, tetapi juga turut melibatkan perjanjian transaksional. Bentuk timbal balik terhadap pemberi dana dapat berupa lobi politik, tender proyek, atau kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan atau individu terkait. Di Indonesia, pihak-pihak yang berkaitan dengan kebijakan sebagian besar berasal dari partai politik, baik itu pejabat pemerintah (presiden dan para menteri) sebagai pihak yang mengajukan kebijakan (dalam bentuk rancangan undang-undang), maupun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pihak yang mengesahkan usulan kebijakan (menjadi undang-undang) (Wulandari, 2012)

Dari fenomena yang dijelaskan diatas bisa disimpulkan bahwa tidak semua perusahaan yang terkoneksi politik pasti aman. Sebagai contoh salah satu perusahaan terkoneksi politik dinyatakan pailit karena tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo adalah PT. Bali Turtle Island Development, perusahaan milik Bambang Trihatmojo (Putra dari Mantan Presiden Soeharto). Salah satu direktur yaitu Sriyanto Muntasram merupakan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Panglima Daerah Militer III Siliwangi (2002-2005). PT BTID berhutang pada Penta Ocean Construction, Co., Ltd atas pengerjaan pengerukan dan reklamasi zona 11 di Pulau Serangan, Bali dengan perjanjian pada tanggal 24 November 1995. Total hutang yang harus dibayar PT BTID pada saat itu sebesar Rp 1.370.316.886,08. Jangka waktu pembayaran hutang tersebut dua belas tahun, namun hutang tersebut tidak dibayar sampai tanggal jatuh tempo (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Koneksi politik adalah sumber daya yang sulit atau mahal bagi perusahaan lain untuk mendapatkannya kepemilikan adalah sumber keunggulan kompetitif (Sutopo, B.,

Trinugroho, I., dan Damayanti,S,M., 2017). Politik merupakan faktor penentu yang penting dari profitabilitas perusahaan (Agrawal & Knoeber, 2001). Politik juga dapat membantu perusahaan dengan pengetahuan tentang prosedur dan memprediksi tindakan yang akan dilakukan pemerintah. Faccio (2006) menjelaskan bahwa untuk memperoleh kinerja financial yang baik maka perusahaan melakukan political connection dikarenakan politik merupakan salah satu penentu utama dari lingkungan kelembagaan suatu negara. Koneksi politik adalah sumber daya yang sulit atau mahal bagi perusahaan lain untuk mendapatkannya kepemilikan adalah sumber keunggulan kompetitif (Sutopo, B., Trinugroho, I., dan Damayanti,S,M., 2017). Politik merupakan faktor penentu yang penting dari profitabilitas perusahaan (Agrawal & Knoeber, 2001). Politik juga dapat membantu perusahaan dengan pengetahuan tentang prosedur dan memprediksi tindakan yang akan dilakukan pemerintah. Faccio (2006) menjelaskan bahwa untuk memperoleh kinerja financial yang baik maka perusahaan melakukan political connection dikarenakan politik merupakan salah satu penentu utama dari lingkungan kelembagaan suatu negara. Dengan terbentuknya koneksi politik maka perusahaan mampu meningkatkan kinerja mereka. Selain itu perusahaan yang terkoneksi politik memperoleh akses yang lebih mudah untuk mendapatkan kredit dan memperoleh manfaat dalam hal kinerja perusahaan.

Selain *political connection*, diversifikasi juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Seiring dengan berkembangnya bisnis di Indonesia, strategi diversifikasi banyak dipilih oleh manajer perusahaan-perusahaan untuk pengembangan bisnisnya. Melalui strategi ini, perusahaan seringkali menghasilkan berbagai jenis produk dan jasa yang berbeda jauh dari kompetensi utama perusahaan tersebut. Strategi diversifikasi dipilih oleh manajer perusahaan guna mempercepat pengembangan usaha, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, menangkap peluang pasar, meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri, mempercepat pertumbuhan perusahaan, dan meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya serta kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan menjadi motivasi perusahaan-perusahaan menerapkan strategi diversifikasi(Hitt et al. 2006). Perusahaan akan mengimplementasikan strategi diversifikasi korporasi ketika perusahaan tersebut beroperasi pada beragam industri atau pasar secara simultan (Barney & Hesterly, 2010). Diversifikasi sendiri merupakan bentuk

pengembangan usaha yang dilakukan dengan cara memperluas jumlah segmen secara bisnis dan geografis maupun menambah jumlah *market share* yang telah beredar atau mengembangkan berbagai produk yang beraneka ragam (Harto, 2005). Barney dan Hesterly (2010) menyatakan bahwa diversifikasi perusahaan dapat dilakukan pada usaha yang terkait maupun yang tidak terkait pada usaha inti. Diversifikasi akan meningkatkan kompleksitas pada bagian – bagian perusahaan, baik secara struktur maupun internal organisasi. Kekompleksitan tersebut membuat perusahaan yang terdiversifikasi menghadapi risiko yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak terdiversifikasi. Contohnya seperti risiko sistematis (inflasi, suku bunga, dsb) dan risiko tidak sistematis (kegagalan dalam perusahaan, risiko finansial, dan risiko manajemen). Sebagian besar perusahaan yang melakukan diversifikasi telah memiliki modal yang kuat guna mendapatkan laba dan *return* yang lebih tinggi.

Terdapat berbagai hasil yang beragam mengenai pengaruh strategi diversifikasi terhadap kinerja perusahaan. Shen, Wang, dan Su (2011) berpendapat bahwa *product and geographic diversification* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Harto (2007) menjelaskan bahwa strategi diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan belum memberikan hasil yang optimal bagi kinerja perusahaan. Kurniasari (2014) menyatakan bahwa variabel diversifikasi usaha tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan diversifikasi tidak memfokuskan pembagian modalnya pada satu produk saja melainkan pada beberapa produk dan hasil yang diperoleh oleh perusahaan terkadang tidak memuaskan. Pengaruh antara strategi diversifikasi terhadap kinerja sebuah perusahaan tidak memiliki 4 keterkaitan (Hoskisson and Hitt, 1990; Markides and Williamson, 1994; Palich, Cardinal, and Miller, 2000; dalam Ojo, 2009).

Perusahaan dituntut untuk terus mengembangkan usahanya lebih baik lagi seiring dengan banyaknya pesaing yang makin kreatif dan inovatif dalam meluncurkan produk yang mampu menarik para konsumen. Hal ini yang menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja penting bagi perusahaan dikarenakan perusahaan dapat melihat potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki, yang mungkin dapat dikendalikan dan diprediksi kapasitas produksinya di masa yang akan datang dari sumber daya yang ada (Barlian, 2003; dalam Orniati, 2009).

Selain dari variabel diatas, karakteristik kepemimpinan juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Zhang et al. (2012) menyatakan bahwa direktur utama suatu perusahaan BUMN dievaluasi oleh pemerintah, di mana pembayaran pajak kepada pemerintah merupakan salah satu pertimbangan evaluasi tersebut. Selain itu, hal ini juga merupakan citra yang baik bagi seorang direktur utama dengan membayar pajak yang besar (Zhang, 2012). Dengan demikian, perusahaan BUMN akan berusaha untuk membayar pajak besar kepada pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada negara yang pada akhirnya membuat direktur utama tersebut tetap dipertahankan menjadi direktur utama atau promosi ke perusahaan BUMN yang lebih besar serta mempertegas legitimasi politiknya. Hal ini tentu juga menjadi citra yang positif bagi para pejabat di suatu BUMN yang semakin menguatkan koneksi politiknya. Menurut Robbins, (2007) mendefinisikan kepemimpinan sebagai *the ability to influence a group toward the achievement of goals* (kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai serangkaian tujuan). Kata “kemampuan”, “pengaruh” dan “kelompok” adalah konsep kunci dari definisi Robbins. Definsi lain, yang cukup sederhana, menurut Mullins, (2005) kepemimpinan adalah *a relationship through which one person influences the behaviour or actions of other people* (menekankan pada konsep “hubungan” melalui seseorang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain). Kepemimpinan dalam definisi yang demikian dapat berlaku baik di organisasi formal, informal, ataupun nonformal.

Dalam perkembangannya, baik dari hasil penelitian dan perkembangan model atau karkarakteristik kepemimpinan, perkembangan organisasi dan manajemen saat ini. Menurut Assauri, (2013), perkembangan pemikiran ahli-ahli manajemen mengenai karakteristik kepemimpinan yang ada dalam literature, bahwa kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting untuk dipelajari, karakteristik kepemimpinan merupakan komponen organisasi yang sangat kompleks, sehingga para ahli berpendapat masalah ini dari berbagai sisi, masing-masing sisi memiliki keunggulan dan kelemahan. Menurut Northouse, (2010) membagi karakteristik kepemimpinan yaitu kepemimpinan situasional, kepeminpinan yang efektif, kepemimpinan kontingensi (ketidakpastian), kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional.

Pada karakteristik kepemimpinan, peneliti menggunakan beberapa karakteristik, diantaranya Latar Belakang Pendidikan, Latar Belakang Pengalaman Fungsional,

Gender, dan Kompensasi. Hal ini didasari oleh fenomena yang terjadi pada penelitian sebelumnya bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian antara penelitian yang satu dengan lainnya karena perbedaan tahun pengambilan sampel perusahaan di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2018. Selain itu, alasan peneliti mengambil pada jangka waktu tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh *political connection*, diversifikasi, dan kepemimpinan terhadap kinerja perusahaan dalam beberapa tahun belakangan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ?
2. Apakah diversifikasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ?
3. Apakah karakteristik kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya memberikan tiga variabel x (*political connection*, diversifikasi, dan karakteristik kepemimpinan) terhadap variabel y (kinerja perusahaan). Batasan masalah lain peneliti hanya mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek pada tahun 2014 – 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh *political connection* terhadap kinerja perusahaan.

2. Untuk menguji pengaruh diversifikasi terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk menguji pengaruh karakteristik kepemimpinan terhadap kinerja perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat antara lain :

1. Bagi akademisi

Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penelitian tentang kinerja perusahaan.

2. Bagi investor

Bagi para investor, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi. Dengan dana yang dimiliki, apakah nantinya investor cenderung melakukan investasi pada perusahaan yang terkoneksi politik atau pada perusahaan yang tidak terkoneksi ke politik.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat sebagai acuan untuk menilai kinerja perusahaan, terutama kinerja perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini akan disajikan mengenai sistematika penulisan penelitian agar lebih mudah dipahami para pembaca. Penelitian ini disajikan ke dalam lima bab beserta penjelasan dari masing – masing bab.

Bab I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan mengenai beberapa teori yang mendukung dalam penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

Bab III : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisis data serta interpretasi hasil.

Bab V : Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan yang merupakan ringkasan dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan serta saran bagi peneliti selanjutnya.

